

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era teknologi modern saat ini, isu *gender inequality* masih sering terjadi, di mana perlakuan antara laki-laki dan perempuan dibedakan di mata masyarakat. Sampai saat ini, perjuangan memperoleh *gender equality* sebagai bagian dari *human security* masih berlanjut oleh para aktivis perempuan dan kaum feminis. Ketidaksetaraan gender sendiri memiliki definisi dimana struktur sosial dalam masyarakat membedakan perilaku, sikap, dan perlakuan kepada laki-laki dan perempuan, yang tidak jarang menimbulkan diskriminasi gender. Kuatnya budaya patriarki menjadi faktor utama dari isu tersebut, dimana perempuan sering dipandang sebelah mata, diremehkan, serta hak-haknya diabaikan. Isu ini kerap terjadi di berbagai negara, tak terkecuali di Turki.

Turki merupakan salah satu negara dengan lingkungan paling menantang dan kompleks dalam upaya promosi kesetaraan gender di dunia modern. Walaupun menyandang status sebagai anggota Uni Eropa dan mempunyai posisi strategis antara Asia dan Eropa, negara ini masih berada diantara sejumlah negara dengan kinerja terburuk di dunia dalam konteks kesetaraan gender. Berdasarkan laporan Kesenjangan Gender 2024 dari *World Economic Forum 2024*, Turki menduduki peringkat ke-127 dari 146 negara di seluruh dunia dalam konteks

kesetaraan gender, menjadikannya di posisi terakhir di Eropa¹. Kesenjangan gender yang konsisten ini terwujud dalam berbagai aspek, termasuk representasi politik, pencapaian pendidikan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk pembunuhan, serta ketidaksetaraan pada aspek ekonomi dan sosial budaya. Salah satu faktor utama yang memperparah kondisi tersebut adalah keputusan Turki keluar dari Konvensi Istanbul pada 2021, sebuah perjanjian penting untuk perlindungan perempuan dari kekerasan, yang kemudian memperkuat posisi gerakan anti-gender yang konservatif di Turki.² Kompleksnya tantangan tersebut membutuhkan intervensi internasional yang terkoordinasi dan komprehensif.

Dalam ranah politik, perempuan menghadapi tantangan serius dalam menduduki peran kepemimpinan dan berpartisipasi dalam politik pada semua level, meskipun seluruh partai politik telah menggunakan kuota dan berbagai upaya sukarela lainnya untuk meningkatkan perwakilan perempuan. Representasi perempuan dalam kursi parlemen Turki hanya mengalami sedikit peningkatan. Pada pemilu 2023, tercatat rekor dengan 121 perempuan dari 600 anggota parlemen (20,1%) naik dari 17,1% pada pemilu sebelumnya.³ Di samping itu, hanya satu dari 17 menteri di level eksekutif yang merupakan perempuan⁴,

¹ World Economic Forum, “Global Gender Gap Report 2024,” 2024, <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/>.

² Femri Resdifianti Nurkhasanah, Dini Septianti, Ratih Kusuma Dewi, “TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP KELUARNYA TURKI” 6, no. 2 (2022): 133–54, <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.302>.

³ Council on Foreign relations, “Women This Week: Women Win Historic Number of Seats in Turkish Parliament,” 2023, <https://www.cfr.org/blog/women-week-women-win-historic-number-seats-turkish-parliament>.

⁴ UN WOMEN EUROPE AND CENTRAL ASIA, “Leadership and Political Participation,” 2023, <https://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey/leadership-and-political-participation>.

ditambah lagi jumlah representasi perempuan dalam politik lokal pun masih sangat rendah.

Dalam bidang ekonomi, perempuan di Turki menghadapi berbagai bentuk ketidaksetaraan gender yang serius di tempat kerja. Mulai dari tingginya persentase perempuan Turki yang bekerja di bidang informal, yang mencapai 44,3% pada tahun 2016, terutama dalam kategori pekerjaan bergensi rendah dengan kurangnya jaminan sosial dan kondisi kerja yang buruk⁵. Masalah pelecehan seksual dalam lingkungan kerja juga signifikan, dengan tingkat paparan pelecehan seksual terhadap perawat perempuan berkisar dari 1,5% hingga 75%⁶ serta 93% masyarakat (mayoritas perempuan) di Turki mengalami berbagai bentuk pelecehan seksual.⁷

Di samping itu, angka kekerasan berbasis gender di Turki pun masih menjadi isu yang serius dan mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan bahwa setidaknya empat dari sepuluh perempuan di Turki pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidup mereka, dengan ratusan dari mereka tewas terbunuh oleh pasangannya setiap tahun, walaupun dalam beberapa kasus mereka telah melaporkan pelaku kepada pihak berwenang lebih dari sekali⁸. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan implementasi hukum di Turki.

⁵ Muratcan Isildak, "Breaking Barriers: How Turkey's Gendered Labor Market Shapes Women's Future Jobs," 2025, <https://moderndiplomacy.eu/2025/05/23/breaking-barriers-how-turkeys-gendered-labor-market-shapes-womens-future-jobs/>.

⁶ Silvia Domit and Damla Kesimal, "Labor Market Gender Gaps in Türkiye: A Bird's Eye View" 2024, no. 17 (2024): 4–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.5089/9798400287022.001>.

⁷ Domit and Kesimal.

⁸ Raquel Santos Fernandes, "The Burden of De-Democratisation: Gender (in)Equality in Turkey," *The Loop*, 2023, <https://theloop.ecpr.eu/the-burden-of-de-democratisation-gender-inequality-in-turkey/>.

Dalam mengatasi isu kesenjangan tersebut, sangat penting bagi negara untuk memajukan dan menyebarkan nilai kesetaraan gender menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kesetaraan gender itu sendiri merupakan sebuah kondisi dimana laki-laki dan perempuan diperlakukan secara setara dalam ranah politik, sosial, ekonomi, dan semua aspek kehidupan masyarakat lainnya, serta tidak didiskriminasi berdasarkan gender mereka⁹. Kesetaraan gender dalam kehidupan sosial masyarakat sangat fundamental dan merupakan prioritas dalam pembangunan berkelanjutan, karena meningkatkan kesetaraan gender sangat penting untuk semua area masyarakat yang sehat, mulai dari mengurangi kemiskinan hingga mempromosikan kesehatan, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan anak perempuan dan laki-laki.¹⁰ Selain menjadi hak asasi manusia yang fundamental, kesetaraan gender sangat krusial karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat demokrasi, meningkatkan kohesi sosial serta meningkatkan kesejahteraan semua anggota masyarakat.¹¹

Mengingat pentingnya nilai kesetaraan gender dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, UN WOMEN hadir untuk berdedikasi dalam mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan di Turki. Organisasi ini telah melakukan banyak aksi nyata melalui berbagai macam inisiatif melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam menjalankan upaya promosi kesetaraan gender, UN WOMEN beraksi dengan

⁹ International Labour Organization, "Gender Equality Programme: More and Better Jobs for Women," 2019, <https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/gender-equality-programme-more-and-better-jobs-women>.

¹⁰ *Op.cit.*, hal. 6

¹¹ *Op.cit.*, hal. 6

melibatkan para laki-laki sebagai partner perempuan dalam menantang keyakinan, praktik, serta struktur patriarki melalui gerakan solidaritas *HeForShe*. Gerakan sosial ini pun didukung oleh sektor privat, masyarakat sipil, anak muda, hingga tokoh masyarakat seperti selebriti untuk memberikan perubahan untuk kesetaraan gender.

Selain itu, UN WOMEN pun memanfaatkan kekuatan olahraga untuk mendorong kesetaraan gender secara lebih luas melalui kolaborasi dengan klub olahraga terkemuka di Turki, Fenerbahçe Sports Club dalam upayanya mempromosikan kesetaraan gender secara inklusif dalam ekosistem olahraga dengan dukungan dari Tüpraş, salah satu industri ternama di Turki¹². Upaya promosi kesetaraan gender UN WOMEN di Turki meliputi area prioritas; aksi kemanusiaan, kepemimpinan dan partisipasi politik, serta mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Turki.¹³ Tujuan dari program UN WOMEN adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan hak-hak perempuan, meningkatkan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan politik dan ekonomi, mengurangi kekerasan berbasis gender, serta membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan antara Pemerintah Turki, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan¹⁴.

¹² UN WOMEN, “UN WOMEN EUROPE AND CENTRAL ASIA : KEMITRAAN SWASTA DAN KETERLIBATAN LAKI-LAKI,” 2024, <https://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey/private-sector-partnerships-and-male-engagement>.

¹³ *Op.cit.*, hal. 6

¹⁴ *Op.cit.*, hal. 6

Turki mengalami dinamika sosial-politik yang rumit terkait isu gender selama periode 2020-2024. Keputusan Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul pada 2021 memberikan dampak pada kemunduran hak-hak perempuan di negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana peran UN WOMEN dalam upaya promosi kesetaraan gender dapat tetap berlanjut meskipun ada tantangan politik di Turki. Penelitian ini nantinya akan berfokus pada peran dari program UN WOMEN dalam meningkatkan kesetaraan gender pada segala aspek melalui promosi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya isu ketidaksetaraan gender, serta pemberantasan diskriminasi gender di negara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

Bagaimana peran UN WOMEN Turki dalam promosi kesetaraan gender di Turki ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang telah disusun oleh penulis, diantaranya :

1. Mengidentifikasi dan menjabarkan permasalahan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan Turki.

2. Mengidentifikasi dan menjabarkan apa saja upaya UN WOMEN dalam mempromosikan kesetaraan gender di Turki.
3. Mengidentifikasi apa saja kebijakan yang dikeluarkan UN WOMEN bersama dengan pemerintah Turki dalam mempromosikan kesetaraan gender.
4. Menganalisa dan menjabarkan peran UN WOMEN dalam mempromosikan kesetaraan gender di Turki.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu bagi studi Hubungan Internasional, dan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan pada promosi kesetaraan gender di Turki. Selain itu, diharapkan dapat memahami bagaimana cara kerja sebuah Organisasi Internasional, khususnya *United Nations Women* (UN WOMEN) dalam menanggulangi isu di suatu negara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi, wawasan, serta dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para anggota penstudi Hubungan Internasional mengenai Promosi Kesetaraan Gender oleh UN WOMEN di Turki.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis juga mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu dan membandingkan metode, alat analisis serta hasil penelitiannya, kemudian membuat kesimpulan dari seluruh penelitian sebelumnya dengan topik serta permasalahan yang sama.

Penelitian pertama berjudul *Peran UN WOMEN dalam Kampanye #HeForShe untuk Keterlibatan Laki-laki dalam Kesetaraan Gender di Indonesia*¹⁵ yang ditulis oleh Vira J menjabarkan tentang upaya UN WOMEN di Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender melalui program HeForShe yang melibatkan laki-laki sebagai partner perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, menurunkan angka kekerasan seksual, serta meningkatkan kesetaraan gender. Program yang dijalankan UN WOMEN tersebut mencerminkan bahwa organisasi ini cukup meningkatkan keterlibatan dan partisipasi laki-laki dalam membantu perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Namun, UN WOMEN menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mengimplementasi program tersebut terhadap norma, budaya, serta kebijakan Pemerintah Indonesia yang berdampak pada integrasi program yang tidak maksimal, ditambah lagi hadirnya pandemi COVID-19 yang menjadi penghambat dari jalannya program tersebut.

Selanjutnya, pada literatur kedua yang berjudul *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kenya oleh UN Women pada Tahun*

¹⁵ Vira Jasmine Saputri, "Peran UN Women Dalam Kampanye #HeForShe Untuk Keterlibatan Laki-Laki Dalam Kesetaraan Gender Di Indonesia," *Journal of Gender and Family Studies*, 2024, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v4i2.28092>.

2020-2022¹⁶ oleh Nurul A. dan Renitha D. menjabarkan mengenai upaya UN WOMEN dalam memberantas kasus kekerasan berbasis gender di Kenya melalui berbagai program yang diinisiasi UN WOMEN meliputi advokasi, kampanye, Forum Kesetaraan Generasi, bantuan mendesak terkait pandemi COVID-19, sampai layanan untuk korban kekerasan. Dalam perannya sebagai problem solver, capacity builder, dan aid provider, UN WOMEN berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran, pemberantasan, serta pencegahan kekerasan pada perempuan di Kenya.

Dalam penelitian ketiga yang berjudul *Investing In the Care Services Sectors for Employment Generation and Gender-Inclusive Growth : The Case of Turkey*¹⁷ oleh Derya G, Ipek I, Ayse Aylin B, dan Pinar O membahas tentang persinggungan krisis perawatan dengan tantangan ekonomi, sosial, dan pengungsi di Turki dengan menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur perawatan untuk meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar pada perempuan, yang memperburuk kesenjangan gender. Dengan memanfaatkan kebijakan International Labour Organization (ILO)–UN Women (2021), penelitian ini memprediksi kesenjangan dalam pendidikan, dan kebutuhan akan ratusan ribu tenaga medis, yang memerlukan investasi dari PDB. Investasi ini akan memberikan jutaan pekerjaan langsung dan tidak langsung, yang menghasilkan

¹⁶ Salma, Nurul Azizah, and Renitha Dwi Hapsari. 2023. "Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kenya Oleh UN Women Pada Tahun 2020-2022". *Jurnal Hubungan Internasional* 16 (2):472-91. <https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.49419>.

¹⁷ Derya Gultekin and Ipek Ilkcaracan, "Investing In the Care Services Sectors for Employment Generation and Gender-Inclusive Growth: The Case of Turkey," 2024, 1–25, <https://doi.org/10.1017/npt.2024.32>.

peningkatan yang signifikan pada total ketenagakerjaan, dimana perempuan diharapkan mengisi mayoritas dari posisi ini. Jika memperhitungkan sekitar 3 juta pengungsi Suriah, total biaya investasi naik secara signifikan dari PDB, yang menciptakan jutaan lapangan kerja langsung. Studi ini kemudian menganjurkan untuk memprioritaskan investasi dalam layanan perawatan untuk mendukung kesetaraan gender, pengembangan manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam literatur keempat, yakni penelitian skripsi dengan judul ***Peran United Nations Women untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender di Turki: Studi Kasus Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul (2020-2023)***¹⁸ yang ditulis oleh Delyfia K. R. membahas tentang upaya-upaya UN WOMEN mempromosikan kesetaraan gender di Turki dengan mengadendakan proyek kampanye dan kerjasama dengan banyak pihak dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Selain itu, UN WOMEN juga memberi serangkaian bantuan kepada pengungsi perempuan Suriah di Turki. Namun sayangnya, upaya UN WOMEN tidak menunjukkan adanya peningkatan dalam keseimbangan gender di Turki. Kegagalan ini dikarenakan adanya berbagai hambatan, di antaranya yaitu munculnya kelompok konservatif dan Gerakan Anti-Gender. Ideologi Anti-Gender yang menolak keseimbangan gender serta sistem pemerintahan Turki yang didominasi oleh kelompok konservatif yang memiliki sistem patriarki pun menjadi penghalang.

¹⁸ Delyfia K. Runtulalo, "Peran United Nations Women Untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender Di Turki: Studi Kasus Keluarnya Turki Dari Konvensi Istanbul (2020-2023)" (Universitas Jenderal Soedirman, 2024), <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/28200>.

Selanjutnya, pada penelitian ke-5 yang berjudul *Turkey's Response to the Global Gender Regime*¹⁹ oleh Nüket K. mengkaji mengenai rezim kesetaraan gender global yang berfokus pada perkembangan, tantangan, serta implementasi spesifik di Turki. Rezim ini muncul melalui kepemimpinan gerakan perempuan global, organisasi UN, serta pemerintah pendukungnya, dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagai instrumen utama. Meskipun rezim ini telah mengalami kenaikan yang signifikan dalam menegakkan hak-hak perempuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya prinsip-prinsip normatif Turki yang tidak jelas, dan sulitnya menerjemahkan norma-norma global ke dalam konteks lokal. Dalam kasus Turki, masih terdapat hambatan sosial, seperti norma-norma budaya tradisional yang menjadi penghalang dalam mencapai kesetaraan gender di Turki.

Pada penelitian ke-6 dengan judul *Beyond Liberal vs Liberating: Women's Economic Empowerment in The United Nations' Women, Peace and Security Agenda*²⁰ oleh Claire D. mengkaji tentang pemberdayaan ekonomi perempuan dalam agenda United Nations (UN) Women, Peace and Security (WPS), Evolusi pemberdayaan ekonomi perempuan dari sebuah konsep liberal yang berakar pada aktivisme feminis, ke interpretasi yang lebih liberal yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pengembangan internasional.

¹⁹ Nüket Kardam, "Turkey's Response to the Global Gender Regime," 2011, 8–23, <https://iknowpolitics.org/en/2012/04/turkeys-response-global-gender-regime>.

²⁰ Claire Duncanson, "Beyond Liberal vs Liberating: Women's Economic Empowerment in the United Nations' Women, Peace and Security Agenda," *International Feminist Journal of Politics* 21, no. 1 (2019): 111–30, <https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1518725>.

Setelah istilah ini diadopsi oleh organisasi-organisasi seperti World Bank dan UN, istilah ini menjadi terfokus pada partisipasi ekonomi individu, yang sering kali justru menimbulkan beban dan bukannya memberikan kebebasan bagi perempuan. Penulis menyoroti ketegangan antara pendekatan liberal dan pendekatan pembebasan dalam agenda UN, *Woman, Peace, and Security* (WPS), bahwa meskipun beberapa resolusi UN menganjurkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, masih banyak inisiatif yang masih terfokus pada kewirausahaan individu dan pelatihan kerja. Penelitian ini menganjurkan untuk melakukan upaya dalam memfasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan advokasi oleh pendukung gerakan WPS. Dengan demikian, hal ini akan memperkuat program WPS untuk berkontribusi terhadap keamanan yang berupa kebebasan dari kekurangan dan rasa takut.

Penelitian ke-7 oleh Jacqui True dengan judul *A Tale of Two Feminisms in International Relations? Feminist Political Economy and The Women, Peace and Security Agenda*²¹ oleh Jacqui T. mengkaji tentang analisis ekonomi politik feminis (FPE) yang terintegrasi dalam hubungan internasional (IR), dimana menekankan hubungan antara gender, kekerasan, dan kekuasaan negara. Penelitian ini menyoroti bagaimana FPE mengungkap permasalahan kekerasan laki-laki terhadap perempuan, baik dalam rumah tangga pribadi maupun dalam konflik yang didukung oleh negara, kemudian

²¹ Jacqui True, "A Tale of Two Feminisms in International Relations? Feminist Political Economy and the Women, Peace and Security Agenda," *Politics and Gender* 11, no. 2 (2015): 419–24, <https://doi.org/10.1017/S1743923X15000136>.

berpendapat bahwa agenda UN, Woman, Peace, and Security (WPS) sering kali hanya berfokus secara sempit pada kekerasan seksual dalam konflik tanpa mengatasi akar penyebabnya, seperti ketidaksetaraan gender dan masalah finansial. Artikel ini menyimpulkan bahwa analisis feminis harus memasukkan ekonomi politik untuk sepenuhnya memahami dan mengatasi kompleksitas dalam hubungan internasional.

Selanjutnya, pada penelitian ke-8 dengan judul *Sustainable Socio-Economic Development of Women: A Blueprint from Vulnerability to Empowerment*²² oleh Ayisha M., dan Hamrila A. L. mengkaji tentang budaya patriarki dalam masyarakat Ghana, di mana laki-laki sering tidak ikut serta dalam berpartisipasi di pekerjaan rumah tangga, yang mengarah ke ketidaksetaraan gender di aspek ekonomi. Penulis menekankan bahwa perlu adanya UU terkait gender dan perubahan budaya demi memberdayakan perempuan secara ekonomi, kemudian juga menyorot pentingnya kontrol perempuan dalam mengolah sumber daya dan pengambilan keputusan, dimana sering dibatasi oleh budaya dan norma leluhur yang memihak laki-laki. Terlepas dari tantangan tersebut, tercatat bahwa partisipasi perempuan mengalami kemajuan dalam kontrol pendapatan, khususnya dari perdagangan UMKM dan bisnis kecil. Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh UN berkaitan pada peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi adalah langkah yang tepat untuk mencapai kesetaraan dalam

²² Ayisha Maigah, "Sustainable Socio-Economic Development of Women: A Blueprint from Vulnerability to Empowerment," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* 12, no. 2 (2023): 167–79, <https://doi.org/10.6007/ijarems/v12-i2/16662>.

kesenjangan gender. Pemberdayaan perempuan mencakup pemenuhan kebutuhan rumah tangga, serta memastikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya yang menunjang hidup. Investasi yang memobilisasi dana untuk upaya yang mendukung partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sangat penting untuk mendorong kesetaraan gender, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Berikutnya, pada penelitian ke-9 dengan judul *International Organizations and the Promotion of Gender Political and Economic Equality in Egypt : The Role of UN Women and USAID*²³ oleh Dr. Nihal S. A. F. El-Shimy mengkaji tentang peran UN WOMEN dan USAID (*United States Agency for International Development*) sebagai Organisasi Internasional dalam mempromosikan kesetaraan gender di Mesir pada sektor ekonomi-politik. Penulis menjabarkan tentang kolaborasi organisasi-organisasi ini dengan mitra nasional dalam meningkatkan suara perempuan dalam pengambilan keputusan dan opini publik, dengan menyadari bahwa pemberdayaan perempuan sangat penting untuk mencapai sustainable development goals (SDGs). Upaya yang dijalankan oleh UN WOMEN antara lain, yaitu kampanye “Taa' Marbouta” bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi perempuan, sementara program-program lainnya berfokus pada peningkatan akses perempuan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan hukum. Proyek-proyek khusus, seperti Program

²³ Nihal Shimy Abdel Fattah El-Shimy, “International Organizations and the Promotion of Gender Political and Economic Equality in Egypt : The Role of UN Women and USAID” 10 (2019): 601–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.21608/jces.2019.69192>.

Pemberdayaan Politik Perempuan dan program *Salheya*, berupaya meningkatkan kepemimpinan perempuan, keamanan di sektor ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan. Kedua Organisasi Internasional ini mengakui bahwa perempuan Mesir menghadapi banyak tantangan akibat diskriminasi, kemiskinan, dan eksploitasi, yang menghambat partisipasi mereka di dunia kerja dan membatasi kontribusi mereka di posisi-posisi senior. Penulis menekankan pentingnya dukungan internasional dalam membina lingkungan di mana perempuan dapat berkembang secara ekonomi dan sosial, yang berkontribusi pada pertumbuhan masyarakat yang lebih luas.

Pada penelitian ke-10, dengan judul *Russian Trends in Ensuring Gender Equality in The Digital Economy*²⁴ oleh Svetlana K., Valentina V., Olga E., dan Kristina K. membahas peran negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) khususnya Rusia, dalam transformasi digital ekonomi. Selama Rusia memimpin BRICS pada 2020, negara-negara anggota memprioritaskan pengembangan digital, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, dan memastikan keadilan akses terhadap teknologi digital. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam akses internet dan layanan digital, masih terdapat kesenjangan gender, terutama di sektor IT, dimana rendahnya peluang perempuan dalam peningkatan karier. Pemerintah Rusia telah menjalankan berbagai strategi, termasuk Strategi Nasional untuk Perempuan, yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan

²⁴ Svetlana Kuzmina et al., "Russian Trends in Ensuring Gender Equality in The Digital Economy," *BIO Web of Conferences* 84 (2024), <https://doi.org/10.1051/bioconf/20248404007>.

perempuan dalam ekonomi digital. Namun, muncul tantangan yang menyebabkan ketidaksetaraan gender di bidang ini, yakni oleh stereotip masyarakat itu sendiri terhadap kompetensi perempuan dan kemampuan mereka untuk menjalankannya. Hal inilah yang menjadi faktor adanya perbedaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam ekonomi digital. Pada akhirnya, penulis menekankan pentingnya kerjasama antara negara, perusahaan, dan masyarakat untuk menghapus stereotip dan memastikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam lanskap digital, yang pada akhirnya berkontribusi pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh UN.

Posisi penelitian dalam artikel terdahulu bersama dengan jenis penelitiannya serta rangkuman hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dilihat dengan tabel berikut.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
<p>Peran UN WOMEN dalam Kampanye #HeForShe untuk Keterlibatan Laki-laki dalam Kesetaraan Gender di Indonesia</p> <p>Oleh : Vira J</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>- Upaya UN WOMEN di Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender melalui program HeForShe mencerminkan bahwa organisasi ini cukup meningkatkan keterlibatan dan partisipasi laki-laki dalam membantu perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mengimplementasi program tersebut terhadap norma, budaya, serta kebijakan Pemerintah Indonesia yang berdampak pada integrasi program yang tidak maksimal, ditambah lagi hadirnya pandemi COVID-19 yang menjadi penghambat dari jalannya program tersebut.
<p>Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kenya oleh UN Women pada Tahun 2020-2022</p> <p>Oleh : Nurul A. dan Renitha D.</p>	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - upaya UN WOMEN dalam memberantas kasus kekerasan berbasis gender di Kenya diimplementasikan melalui berbagai program meliputi advokasi, kampanye, Forum Kesetaraan Generasi, bantuan mendesak terkait pandemi COVID-19, sampai layanan untuk korban kekerasan. - Dalam perannya sebagai problem solver, capacity builder, dan aid provider, OI tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran, pemberantasan, serta pencegahan kekerasan pada perempuan di Kenya.
<p>Investing In the Care Services Sectors for Employment Generation and Gender-Inclusive Growth : The Case of Turkey</p> <p>Oleh : <u>Derya G</u>, Ipek I, Ayse Aylin B, dan Pinar O</p>	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Pentingnya memperkuat infrastruktur perawatan untuk meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar pada perempuan, - Dengan memanfaatkan kebijakan International Labour Organization (ILO)–

		UN Women (2021), diprediksi adanya kesenjangan dalam pendidikan, dan kebutuhan akan ratusan ribu tenaga medis, yang memerlukan investasi dari PDB
<p>United Nations Women untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender di Turki: Studi Kasus Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul (2020-2023)</p> <p>Oleh : Delyfia K. R.</p>	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya UN WOMEN gagal dalam mempromosikan kesetaraan gender di Turki. Kegagalan ini dikarenakan adanya berbagai hambatan, di antaranya yaitu munculnya kelompok konservatif dan Gerakan Anti-Gender. Ideologi Anti-Gender yang menolak adanya kesetaraan gender serta sistem pemerintahan Turki yang didominasi oleh kelompok konservatif dan budaya patriarki menjadi penghalang.
<p>Turkey's Response to the Global Gender Regime</p> <p>Oleh : Nuket K.</p>	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Rezim kesetaraan gender global di Turki yang muncul melalui gerakan perempuan global, organisasi UN, serta pemerintah pendukungnya, dengan CEDAW sebagai instrumen utama telah mengalami kenaikan yang signifikan dalam menegakkan hak-hak perempuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan berupa hambatan sosial di Turki.
<p>Beyond Liberal vs Liberating: Women's Economic Empowerment in The United Nations' Women, Peace and Security Agenda</p>	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda UN WPS yang menganjurkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, masih terfokus pada kewirausahaan individu dan pelatihan kerja

<p>Oleh : Claire D.</p>		<p>sehingga menjadi beban, bukannya kebebasan. Penulis menyarankan untuk memfasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan advokasi oleh pendukung gerakan WPS.</p>
<p>A Tale of Two Feminisms in International Relations? Feminist Political Economy and the Women, Peace and Security Agenda</p> <p>Oleh : Jacqui T.</p>	<p>Deskriptif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda UN, Woman, Peace, and Security (WPS) sering kali hanya berfokus secara sempit pada kekerasan seksual dalam konflik tanpa mengatasi akar penyebabnya, seperti ketidaksetaraan gender dan masalah finansial. Penulis menyimpulkan bahwa analisis feminis harus memasukkan ekonomi politik untuk memahami dan mengatasi kompleksitas dalam hubungan internasional dengan baik.
<p>Sustainable Socio-Economic Development of Women: A Blueprint from Vulnerability to Empowerment</p> <p>Oleh : Ayisha M., dan Hamrila A. L.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Budaya patriarki di Ghana menyebabkan minimnya partisipasi laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga, yang menjadi dampak ketidaksetaraan gender pada aspek ekonomi - Salah satu tujuan dari <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) oleh UN berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dapat diwujudkan

		<p>demi mencapai kesetaraan gender. Program yang dijalankan, yaitu pemberdayaan perempuan, mencakup pemenuhan kebutuhan rumah tangga, memastikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya, serta penyediaan investasi.</p>
<p>International Organizations and the Promotion of Gender Political and Economic Equality in Egypt : The Role of UN Women and USAID</p> <p>Oleh : Nihal S. A. F. El-Shimy</p>	Deskriptif	<p>- UN WOMEN dan USAID telah mengupayakan berbagai hal dalam mempromosikan kesetaraan gender di sektor ekonomi-politik, namun menghadapi tantangan, dimana perempuan Mesir mengalami diskriminasi, kemiskinan, dan eksploitasi, yang menghambat partisipasi mereka di dunia kerja.</p>
<p>Russian Trends in Ensuring Gender Equality in The Digital Economy</p> <p>Oleh : Svetlana K., Valentina V., Olga E., dan Kristina. K.</p>	Deskriptif	<p>- Negara-negara anggota BRICS pada tahun 2020, terutama Pemerintah Rusia telah meluncurkan</p>

		<p>strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam ekonomi digital, namun stereotip terhadap kompetensi perempuan masih menghambat kesempatan mereka. Diperlukan kerjasama antara negara, perusahaan, serta masyarakat untuk menghapus stereotip dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkarir dalam bidang tersebut, agar dapat berkontribusi pada tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh UN.</p>
--	--	---

Dari berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan UN dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi pendorong bagi pemerintah negara-negara yang memiliki permasalahan kesenjangan gender untuk mengupayakan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, kehadiran UN WOMEN dan program-programnya di berbagai

negara telah membantu dalam mempromosikan kesetaraan gender, namun masih menghadapi banyak tantangan yang menjadi penghambat, yaitu budaya patriarki yang kuat, stereotipe dari masyarakat, dan norma-norma tradisional yang tidak jelas. Agenda yang organisasi ini upayakan juga hanya berfokus secara sempit pada isu kekerasan seksual, sehingga tidak dapat mengatasi akar permasalahannya, yakni sistem Pemerintahan Turki yang menganut budaya patriarki dan nilai budaya tradisional yang kuat.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Konsep Organisasi Internasional

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan konsep Organisasi Internasional. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai salah satu jenis organisasi internasional, yaitu organisasi antarpemerintah (IGO). Menurut Michael G. Schechter (2010) dalam bukunya yang berjudul “*Historical Dictionary of International Organizations*” mendefinisikan Organisasi Internasional adalah birokrasi yang sering kali merupakan hasil kerja sama pemerintah untuk memecahkan permasalahan mereka. Mereka memiliki kop surat, kantor, dan staf tetap (sekretariat).²⁵

Sementara itu, Kelly-Kate S. Pease (2019) menjabarkan bahwa

Organisasi Internasional merupakan lembaga formal yang anggota utamanya

²⁵ Michael G Schechter, *Historical Dictionary of International Organizations*, *Choice Reviews Online*, vol. 47, 2010, <https://doi.org/10.5860/choice.47-6027>.

adalah negara.²⁶ Negara adalah aktor yang sangat penting dalam politik dunia dan sering membentuk OI untuk membantu mengatasi masalah kolektif. OI semacam ini disebut organisasi antarpemerintah (IGO) karena pemerintah bergabung secara sukarela, memberikan pendanaan, dan mengambil keputusan dalam organisasi tersebut. Tujuan, struktur, dan prosedur pengambilan keputusan mereka dijabarkan dengan rinci dalam piagam atau perjanjian. Sumber pendanaannya biasanya berupa alokasi pemerintah (pendanaan rutin / kontribusi sukarela). Karakteristik IGO yaitu organisasi ini bertindak tanpa mencari *profit*.²⁷

IGO dikategorikan lebih lanjut berdasarkan keanggotaan. Pertama, IGO dapat mempunyai keanggotaan universal dimana semua negara dapat bergabung, seperti UN. IGO juga dapat memiliki keanggotaan terbatas karena partisipasinya dibatasi oleh beberapa kriteria. Contohnya, Liga Arab, yakni organisasi sukarela negara-negara di Kawasan Timur Tengah yang Sebagian besar penduduknya berbicara Bahasa Arab. Organisasi ini didirikan untuk memperkuat hubungan Arab serta mempromosikan tujuan ekonomi dan politik bersama.

IGO juga dapat dikategorikan berdasarkan tujuannya. Di satu sisi, IGO dapat berupa organisasi multiguna, yang artinya mereka dapat menangani isu internasional apa pun, seperti UN. Namun, IGO juga dapat berfokus pada isu ekonomi atau sosial tertentu. Contohnya yaitu Organisasi

²⁶ Kelly-Kate S Pease, *International Organizations: Perspectives on Global Governance* (Routledge, 2019).

²⁷ *Ibid.*

Buruh Internasional (ILO), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). IGO khusus ini memberikan analisis dan para ahli terhadap isu-isu yang sangat spesifik.

Mekanisme pengambilan Keputusan dalam IGO mencakup proses yang sangat kompleks dan melibatkan lembaga dan prosedur yang berbeda. Tiap-tiap IGO mempunyai badan pengambil keputusan, contohnya dewan atau majelis umum. Setiap IGO memiliki badan pengambil keputusan, seperti majelis umum atau dewan, di mana delegasi dari para negara anggota bernegosiasi untuk mencapai konsensus. Jika konsensus tercapai, dapat memakai mekanisme voting dengan menerapkan bentuk *voting* yang berbeda, seperti suara terbanyak atau mayoritas 2/3. Dalam proses ini, seringkali melibatkan diplomasi multilateral yang kuat, di mana para negara anggota berusaha mencapai kesepakatan melalui negosiasi dan kompromi.

Hasil Keputusan dan Agenda dalam IGO juga dapat dipengaruhi oleh aktor non-negara, seperti organisasi non-pemerintah (NGO) dan perusahaan swasta melalui advokasi serta lobi. Di samping itu, pengambilan keputusan juga dipengaruhi faktor perbedaan kekuasaan antara negara anggota, yang mana negara-negara besar sering mendapat suara yang juga lebih besar. Pada beberapa IGO, proses pengambilan keputusan juga melibatkan partisipasi publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam buku Susan Park, *International Organizations and Global Problems: Theories and Explanations* (2017) menjabarkan peran organisasi

internasional yang relevan dengan promosi kesetaraan gender, yakni peran advokasi dan *Problem Solver*. Peran advokasi mencakup tindakan organisasi internasional dalam menyuarakan perubahan dengan memengaruhi cara suatu negara memahami dan menyelesaikan masalah melalui peningkatan kesadaran terkait isu-isu global yang mendesak. Sementara itu, dalam peran *problem solver*, OI berperan sebagai pemecah masalah yang handal dalam isu global. Mereka menganalisis akar permasalahan, kemudian menciptakan solusi yang komprehensif dan berkolaborasi dengan pemerintah, OI lainnya, LSM, serta para perusahaan swasta.²⁸

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Metode ini merupakan karakteristik penelitian yang mengungkapkan dan menguraikan baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, secara lebih terperinci, spesifik, dan mendalam²⁹. Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengilustrasikan kondisi atau karakteristik suatu objek penelitian sebagaimana adanya. Hasil dari penelitian deskriptif akan menjawab bagaimana suatu peristiwa terjadi pada objek

²⁸ Susan Park, *International Organisations and Global Problems: Theories and Explanations*, *International Organisations and Global Problems: Theories and Explanations*, 2019, <https://doi.org/10.1017/9781139924788>.

²⁹Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2007, https://repository.upi.edu/7985/3/s_pai_0801074_chapter3.pdf.

tersebut³⁰. Ciri-ciri dari metode penelitian ini antara lain, dapat mendeskripsikan variabel, lalu hasil penelitian disajikan sesuai data, data dikumpulkan pada periode tertentu, serta wilayah penelitian bersifat fleksibel.³¹ Contoh implementasi pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas metode pengajaran tertentu, tingkat kesadaran masyarakat, perilaku konsumen, dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode ini agar dapat memberi pemahaman secara komprehensif kepada pembaca terkait pengaruh organisasi UN WOMEN pada fenomena ketidaksetaraan gender di suatu negara.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yang berfokus pada data yang dikumpulkan dengan menjaring data-data dari proses pengumpulan data yang membahas konsep permasalahan yang tidak disertai oleh angka. Lalu, jenis analisa kuantitatif yang digunakan adalah *content analysis* atau teknik analisa konten, dimana peneliti menganalisis isi gambar, teks, maupun video pada konteks tertentu.³²

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah teknik *document research* (studi dokumen), dimana teknik penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui dokumen-dokumen

³⁰ Revoedu, “Memahami Penelitian Deskriptif: Konsep, Metode, Dan Implementasinya Dalam Dunia Akademik,” 2025, <https://revoedu.org/article/memahami-penelitian-deskriptif-konsep-metode-dan-implementasinya-dalam-dunia-akademik/>.

³¹ Sevima, “Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri Dan Contohnya,” 2022, <https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/>.

³² Salmaa, “Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, Dan Langkah,” 2023, https://penerbitdepublish.com/teknik-analisis-data/#1_Teknik_Analisis_Data_Kualitatif.

tertulis(buku, arsip, tulisan angka, dan gambar) yang berupa laporan serta keterangan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Teknik ini melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, serta analisis dari dokumen-dokumen tersebut³³. Dalam meneliti, penulis hanya mengumpulkan data berbentuk *Secondary Source Documents*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu dokumen laporan UNDP Turki, dokumen laporan kinerja UN WOMEN Turki, website resmi UN WOMEN, serta artikel, jurnal, dan media massa yang bertema promosi kesetaraan gender di Turki dan merupakan data dengan penulisan formal yang valid untuk digunakan.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Materi

Materi yang di bahas dalam penelitian ini mengacu pada studi promosi kesetaraan gender. Pembahasan promosi kesetaraan gender yang dimaksud oleh penulis yakni mencakup upaya, strategi serta proyek yang diusung oleh UN WOMEN Turki beserta mitra yang berkolaborasi dengannya meliputi advokasi dalam menuntut perubahan kebijakan yang *pro-gender*, promosi *gender equality* melalui berbagai jenis media dan saluran, serta upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di Turki.

b. Batasan Waktu

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Rentang waktu yang dibahas di penelitian ini yaitu mulai dari tahun 2020 – 2024. Periode ini memungkinkan analisis perkembangan inisiatif UN WOMEN terkait upaya promosi kesetaraan gender di Turki yang bermitra dengan pemerintah Turki, CSO, selebriti, klub olahraga, dan sektor swasta.

1.7 Argumen Dasar

UN WOMEN memiliki 2 peran utama dalam upayanya pada promosi kesetaraan gender di Turki. Pertama, peran advokasinya yang komprehensif. Sejak 2020, UN WOMEN berfokus pada upaya *raising awareness* dalam memberantas stereotipe gender dan isu kekerasan terhadap perempuan. Dalam bekerja sebagai advokat, UN WOMEN menjalankan strategi advokasi multi-dimensi yang menggabungkan pendekatan naratif melalui kampanye media sosial, advokasi struktural melalui prinsip WEP untuk mengubah praktik bisnis, lalu advokasi kultural melalui Unstereotype Alliance untuk mengubah representasi media, serta pemanfaatan *soft power* melalui kolaborasi dengan Kerem Bürsin dan Fenerbahçe Sports Club untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan menjalankan konsep advokasi yang melibatkan sektor privat, industri hiburan, olahraga, dan media, serta didukung oleh panduan komunikasi marketing yang berbasis data, UN WOMEN Turki telah memberikan kontribusi transformatif yang tidak hanya mengubah persepsi publik pada konteks isu kesetaraan gender, tetapi juga mendorong perubahan

dalam kebijakan di Turki agar lebih responsif gender, sehingga menciptakan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesetaraan gender di Turki.

Peran kedua, yakni sebagai *problem solver*. Pada peran ini, UN WOMEN menunjukkan peran krusial dalam promosi kesetaraan gender di Turki selama periode 2020-2024 melalui intervensi multi-dimensi yang menggabungkan kampanye digital inovatif, kolaborasi strategis lintas sektor, serta upaya transformatif seperti kampanye melalui periklanan yang mengubah representasi gender dalam media. Di samping itu, panduan komunikasi marketing yang dipublikasi UN WOMEN Turki telah membangun ekosistem kolaboratif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, olahraga, dan industri hiburan, UN WOMEN Turki bisa dikatakan berhasil mengatasi tantangan ketidaksetaraan gender yang kompleks di Turki melalui strategi yang tidak hanya meningkatkan awareness publik, tetapi juga mendorong perubahan yang berkelanjutan dalam norma sosial, praktik bisnis, dan representasi media yang mendukung kesetaraan gender.

1.8 Struktur Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teori 1.5.1 Konsep Organisasi Internasional 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Tipe Penelitian 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Argumen Dasar 1.8 Struktur Penulisan
BAB II Isu Ketidaksetaraan Gender di Turki	2.1 Kondisi Ketidaksetaraan Gender di Turki 2.2 Gambaran Umum UN Women Turki dalam Menciptakan Kesetaraan Gender 2.3 Program UN WOMEN Turki dalam Promosi Kesetaraan Gender 2.3.1 Kemitraan dengan Sektor Swasta 2.3.2 Kampanye Kesetaraan Gender melalui Media

<p>BAB III</p> <p>Peran UN WOMEN Turki dalam Promosi Kesetaraan Gender</p>	<p>3.1 Kampanye : Dari Influencer, Karya Seni, Hingga Klub Sepakbola</p> <p>3.2 Problem Solver dan Upaya Kolaborasi dengan Pemerintah dan Sektor Privat</p>
<p>BAB IV</p> <p>PENUTUP</p>	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>
<p>DAFTAR PUSTAKA</p>	

